

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Iqbal Muhammad Nur
NIM. 07011381823155**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
OKTOBER 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Muhammad Nur
NIM : 07011381823155
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Februari 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam penambahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diemukan bukti ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, September 2022

Yang membuat pernyataan,



Iqbal Muhammad Nur
07011381823155

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**IQBAL MUHAMMAD NUR
07011381823155**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

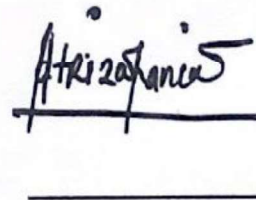
Pembimbing I

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003**



Pembimbing II

**Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 19681022 199702 001**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2017-2020**

**Skripsi
Oleh:**

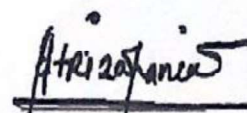
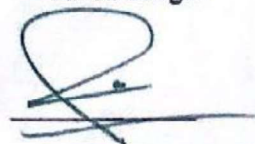
**Iqbal Muhammad Nur
07011381823155**

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 oktober 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Pembimbing:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003
2. Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 19681022 199702 2 001

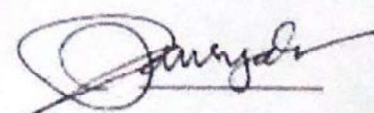
Tanda Tangan



Penguji:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 19880127 201903 1 005


Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fisip Unsri

Prof. Dr. Alfetri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

MOTTO PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah ayat 286)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Ayah Achmad Yunus dan Ibu saya Ari Sawitri) sebagai motivasu dan selalu mendukung dalam hal apapun.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Almamater yang menjadi kebanggaanku
4. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018
5. Seluruh Staf dan karyawan FISIP UNSRI

ABSTRACT

The title of this research is "Local Government Financial Performance at the Bekasi City Regional Financial and Asset Management Agency in 2017-2020". A tool to measure the financial performance of local governments using financial ratios and Time Series visualization. The financial ratios used include the efficiency ratio, the independence ratio, the degree of decentralization ratio, the PAD effectiveness ratio, and the regional dependency ratio. The type of research used in this research is qualitative. Primary data in the form of Realization Report of the Revenue and Expenditure Budget for the 2017-2020 Fiscal Year obtained from the Bekasi City Regional Financial and Asset Management Agency. The results of this study indicate that the level of efficiency in the city of Bekasi has increased from inefficient to efficient, but in terms of the level of independence, the city of Bekasi shows a pattern of participatory relationships or is almost completely independent. The degree of decentralization of Bekasi City shows in the good category, but in terms of the level of effectiveness of PAD, Bekasi City has experienced ineffective from year to year. The ratio of regional dependence to the center of Bekasi City shows very high from year to year.

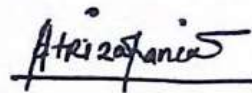
Keywords: Financial performance. Local Government, Financial Ratios.

ADVISOR I



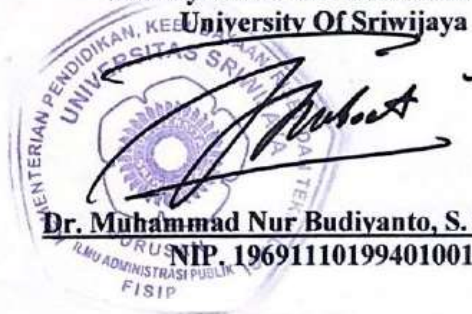
Sofyan ENendi, S. IP., M.Si
NIP.19770512 200312 1 003

ADVISOR II



Dr. Katriza Imania, M. Si
NIP 19681022 199702 001

Palembang, September 2022
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 19691110199401001

ABSTRAK

Judul penelitian ini “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020”. Alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan dan visualisasi *Time Series*. Rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, dan rasio ketergantungan daerah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data primer yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tidak efisien ke efisien, namun dari segi tingkat kemandirian Kota Bekasi menunjukkan pola hubungan partisipatif atau hampir sepenuhnya mandiri. Tingkat derajat desentralisasi Kota Bekasi menunjukkan pada kategori baik, namun dari segi tingkat efektivitas PAD Kota Bekasi dari tahun ke tahun mengalami tidak efektif. Rasio ketergantungan daerah terhadap pusat Kota Bekasi menunjukkan sangat tinggi dari tahun ke tahun.

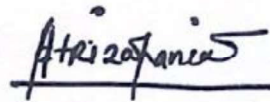
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan.

PEMBIMBING I



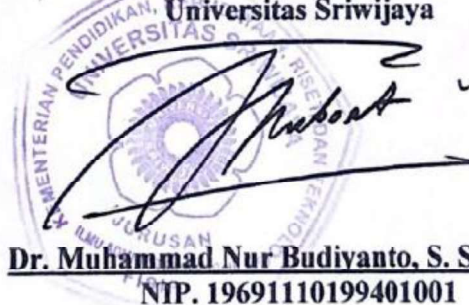
Sofyan Effendi, S. IP., M.Si
NIP.19770512 200312 1 003

PEMBIMBING II



Dr. Katriza Imania, M. Si
NIP 19681022 199702 001

Palembang, September 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 19691110199401001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat serta berkat karania-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Tahun 2017-2020 sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penyelesaian Skripsi dari banyak sekali pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada orang tua, kepada ayahanda Achmad Yunus dan ibunda Ari Sawitri tercinta yang senantiasa menyampaikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yg selalu dipanjatkan pada Allah kepada penulis.

Skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk merampungkan pendidikan Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP.,S.H.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku pembimbing 1 skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran, nasehat serta masukan untuk kelancaran skripsi.
6. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si, selaku pembimbing 2 skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran, nasehat serta masukan untuk kelancaran skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu dan pendidikan kepada saya mulai awal perkuliahan hingga menyelesaikan masa studi saya.
8. Bapak Drs. Nadih Arifin, M.Si, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Ibu Aning Setyaningrum, S.IP, selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10. Segenap staf di setiap bagian dan sub bagian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
11. Bapak Nesan Sujana, S.T., M.T., CRP., CRMP selaku Plt Inspektur Daerah Inspektorat Kota Bekasi.
12. Ibu Danis Endang Wahyuli, SE., CRP., CGAA selaku Auditor 1 Inspektur Pembantu Wilayah 3.
13. Segenap staf di setiap bagian dan sub bagian di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
14. Drs. H. Aan Suhandi, S.H., M.Si., M.H. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

15. Dra. EC. Suminah, M.M selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
16. Segenap staf di setiap bagian dan sub bagian di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
17. Kedua Adik; Iqtyrani Nisa dan Iqtam Maul Amal Yunus yang selalu memberikan hiburan dan semangat.
18. Sahabatku yang selalu menemani diskusi bersama untuk menyelesaikan penelitian ini bersama Yayan, Bintara, Daffa, Dimas, Indra, wibi dan zaki.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan ini dalam mencapai kesempurnaan. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Palembang, 13 Oktober 2022
Penulis,

Iqbal Muhammad Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Anggaran.....	8
a. Pengertian Anggaran.....	8
b. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	10
c. Karakteristik Anggaran Sektor Publik.....	11
d. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik.....	12
e. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	14
f. Siklus Penganggaran Sektor Publik.....	16
g. Unsur-unsur APBD.....	19
2. Analisis Laporan Keuangan.....	21
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	21
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	21

c. Manfaat Laporan Keuangan	22
3. Pengukuran Kinerja	23
a. Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan.....	23
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	23
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	24
4. Analisis Rasio Keuangan	25
a. Pengertian Rasio Keuangan.....	25
b. Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan	25
c. Kelebihan dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pemikiran	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Definisi Konsep.....	55
C. Fokus Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Informan Penelitian.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data	58
H. Teknik Keabsahan Data.....	60
I. Jadwal Penelitian.....	63
J. Sistematika Penulisan	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.....	65
B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020	80
1. Hasil Penelitian.....	81
2. Hasil Pembahasan	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi	3
2. Realisasi Pendapatan dan Bantuan Pusat dan Pinjaman Kota Bekasi	4
3. Tingkat Kemiskinan di Kota Bekasi.....	5
4. Kriteria Efisiensi Keuangan daerah.....	26
5. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27
6. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah	28
7. Kriteria Rasio Efektivitas PAD	29
8. Kriteria Rasio Ketergantungan Daerah.....	30
9. Penelitian Terdahulu.....	34
10. Fokus Penelitian	57
11. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020.....	81
12. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020.....	83
13. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Bekasi Tahun 2017-2020	85
14. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Bekasi Tahun 2017-2020.....	86
15. Target dan Realisasi Peningkatan PAD.....	87
16. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020	89
17. Hasil Pengukuran Accuracy Measures pada Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	89
18. Hasil Pengukuran Accuracy Measures pada Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	92
19. Hasil Pengukuran Accuracy Measures pada Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.....	94
20. Hasil Pengukuran Accuracy Measures pada Rasio Efektivitas PAD Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.....	96
21. Hasil Pengukuran Accuracy Measures pada Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.....	98
22. Matriks Hasil Penelitian	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Siklus Penganggaran Sektor Publik.....	17
2. Data Stationer	30
3. Data Trend	31
4. Data Seasonal.....	32
5. Pola Siklus	33
6. Kerangka Pemikiran	54
7. Struktur Organisasi BPKAD.....	71
8. Visualisasi Trend Time Series Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	93
9. Visualisasi Trend Time Series Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	95
10. Visualisasi Trend Time Series Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	97
11. Visualisasi Trend Time Series Efektivitas PAD Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	99
12. Visualisasi Trend Time Series Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	101

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

<i>Accountability</i>	: Akuntabilitas
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<i>consensus orientation</i>	: Kepentingan Umum
COVID 19	: <i>Corona Virus Desease 19</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>Effectiveness</i>	: Efektivitas
<i>efficiency</i>	: Efisiensi
<i>equity</i>	: Kesetaraan
<i>Good Governance</i>	: Pemerintahan yang Baik
<i>managerial plan for action</i>	: Rencana Aksi Manajerial
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
<i>participation</i>	: Partisipasi
Pergub	: Peraturan Gubernur
<i>responsiveness</i>	: Daya Tanggap
Rp	: Rupiah
<i>rule of law</i>	: Penegakan Hukum
<i>Strategic vision</i>	: Visi Kedepan
<i>transparency</i>	: Transparansi
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara 116
2. LRA APBD Kota Bekasi Tahun 2017-2020 112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja organisasi pemerintah saat ini semakin diperhatikan oleh publik karena keingintahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Stigma masyarakat mengenai organisasi pemerintah yang melakukan pemborosan, aliran dana yang tidak jelas, dan institusi yang selalu mengalami kerugian mengakibatkan adanya desakan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga sektor publik. Desakan masyarakat tersebut sinkron dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan sebagai landasan untuk serangkaian reformasi kelembagaan dalam mewujudkan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.

Pengukuran kinerja adalah alat yang berguna untuk menilai keberhasilan organisasi, pada organisasi sektor publik, keberhasilan suatu organisasi tersebut akan dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat. Publik akan menilai keberhasilan organisasi sektor publik dengan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. pelayanan public tersebut menjadi *bottom line* pada organisasi sektor publik. setiap negara maju menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda-beda untuk memeriksa pelayanan berkualitas untuk warganya Mahmudi (2007:12).

Kinerja keuangan daerah adalah tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. salah satu cara untuk menilai kinerja tersebut dengan menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tersebut merupakan aktivitas untuk menginterpretasikan angka-angka di laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisisnya dipergunakan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, serta politik Mahmudi (2010: 89).

Penilaian kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan terdiri dari efektivitas dan efisiensi, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. hasil analisis rasio keuangan nantinya akan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai Mahmudi (2010:142).

Pemerintah Kota Bekasi menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual (*cash towards accrual*) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang dimana transaksi ekonomi atau kejadian lainnya diakui, dicatat, dan ditulis dalam laporan keuangan saat terjadinya transaksi keuangan tersebut, dengan tidak memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (KSAP,2006). pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi diukur dengan menganalisis laporan keuangan yaitu melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2017 dan 2018 mengalami defisit cukup tinggi. defisit tersebut adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Surplus/Defisit (Rp.)
2017	4.756.703.208.558	4.981.195.360.624	-224.492.152.066
2018	4.835.980.257.174	5.000.442.687.914	-164.462.430.740
2019	5.963.929.792.508	5.566.376.729.279	397.553.023.229
2020	5.092.165.753.501	4.785.811.812.190	306.353.941.311

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi 2017-2020 (diolah peneliti tahun 2022)

Tabel 1 mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja daerah kota Bekasi mengalami penurunan (defisit) pada tahun 2017 dan 2018. ini terjadi karena nilai realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai realisasi belanja yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.756.703.208.558,- dan Rp. 4.981.195.360.624,- sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.835.980.257.174,- dan Rp. 5.000.442.687.624,-. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah realisasinya tidak mencapai target. Menurut Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi (2017) pada tahun 2018 sumber pendapatan dari dana bantuan seperti bantuan keuangan dari DKI Jakarta tidak ter-realisasi sehingga berdampak kepada pendapatan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak tercapainya target pendapatan daerah ini mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa bantuan pusat serta pinjaman yang terdiri dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah lebih besar saat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah pemkot Bekasi dalam menggali potensi asal-asal keuangan masih kurang maksimal . pendapatan asli daerah

tersebut merupakan seluruh penerimaan daerah yang diterima dari sumber ekonomi asli daerah, sedangkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. dapat ditinjau menjadi berikut:

Tabel 2
Realisasi Pendapatan dan Bantuan Pusat dan Pinjaman Kota Bekasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Bantuan Pusat dan Pinjaman	
		Pendapatan Transfer (Rp.)	Lain-Lain Pendapatan yang sah (Rp.)
2017	1.988.356.922.192	2.765.387.704.014	2.958.582.352
2018	2.001.150.459.494	2.645.358.572.147	189.471.225.533
2019	2.442.151.873.746	3.329.109.212.222	192.671.706.540
2020	2.048.909.314.820	2.843.989.275.635	199.267.163.046

Sumber: Laporan Realisasi APBD BPKAD Kota Bekasi (diolah peneliti tahun 2022)

Berdasarkan tabel 2 data yang diolah mengenai realisasi pendapatan asli daerah dan bantuan dari pusat dan pinjaman, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan terjadi penurunan pada tahun 2020. hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 berakibat pada banyaknya sektor usaha menghentikan kegiatannya sehingga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Selain itu adanya kebijakan relaksasi pajak daerah selama masa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan atas denda pajak daerah.

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2020, dana bantuan pusat serta pinjaman dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta provinsi lebih besar dibandingkan pendapatan asli wilayah Kota Bekasi. ialah Pemerintah Daerah Kota Bekasi kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah sebab dana bantuan pusat dari pendapatan

transfer pemerintah pusat dan provinsi yang relatif besar, sebagai akibatnya keuangan daerah masih bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

Dari data laporan keuangan diatas yang dimana mengalami defisit pada tahun 2017-2018 dan juga ketergantungan terhadap bantuan pusat dan pinjaman provinsi, apabila disandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Kemiskinan di Kota Bekasi

Kemiskinan	Kemiskinan			
	2017	2018	2019	2020
Penduduk Miskin (000) jiwa	136.01	119,82	113,65	134,01
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4.79	4,11	3,81	4,38

Sumber: bekasikota.bps.go.id (diolah penulis 2022)

Pada tabel 3 Tingkat Kemiskinan pada Kota Bekasi di tahun 2017 merupakan tingkat jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan tahun lainnya, hal tersebut selaras dengan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2017 dimana terjadi defisit anggaran di tahun tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan tingkat kemiskinan Kota Bekasi hingga 23.000 jiwa, namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 21.000 penduduk sehingga menjadi 134.000 jiwa. Kenaikkan di tahun 2020 disebabkan pandemi *Covid-19* yang merebak di Indonesia sehingga terjadi penurunan pada sektor ekonomi.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah telah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Keintjem & Murni (2022) yang mengkaji penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Mangantar & Deborah (2020) yang mengkaji tentang analisis kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, H. F. Harahap, (2020) yang mengkaji penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah, Setyawati & Rahayu (2019) yang mengkaji penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, Sartika (2019) yang mengkaji penelitian tentang analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kepulauan Meranti, Wardana & Rahmawati yang mengkaji penelitian tentang menilai kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan (Studi Kasus BKAD Sleman), (Tarjunajah & Wiratno, 2018) yang mengkaji tentang kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah se-Jabodetabek dan masih banyak penelitian lainnya hingga 20 (dua puluh) jurnal penelitian terdahulu terkait penanggulangan bencana. Namun belum banyak yang mengkaji tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Bekasi. Penggunaan teori analisis rasio keuangan dengan lokus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Berdasarkan kajian kinerja keuangan negara dan keuangan daerah khususnya di Kota Bekasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan temuan-temuan pada penulisan ini akan sebagai bahan yang berguna bagi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Keuangan Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi, dalam upaya mewujudkan optimalnya pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N., Mukhzadrufa, & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 5, 132–144.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Bastian, I., & Saat, S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Dunan, H., Barusman, A. R. P., & Mandala, S. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Jurnal Visionist*, 9, 35–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v1i1.2381>
- Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Astuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 9, 2541–1314. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5443>
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah* (1st ed.). UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3: Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya sebagai Alat Pengawasan pada Perum PERUMNAS Regional 1 Medan. *Prosiding Frima*, 1, 7–15.
<http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/10/4>
- Hanum, Z., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *FRAMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, No 2 (2019): Prosiding FRIMA.
<http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/10>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economic Business*, 4, 35–38.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Hariani, S., & Awani, M. F. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 2685–2888. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Kaharti, E. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 126(1), 1–7.

- Kaharti, E. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 1–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32639/jiak.v8i2.293>
- Karno, S., Kartika, D., & Aliyah, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3, 40–55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jie.v0iNo%201.1264>
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019. *JURNAL EMBA: JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1, 953–962.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.38525>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2, 17–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (cet. 21). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.).
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mangantar, M., & Deborah, P. J. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. *JURNAL EMBA: JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 8, 292–301.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i1.27534>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan : Edisi Revisi / Mardiasmo*. ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Mardiasmo (ed.); 2018th ed.). ANDI.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Universitas Indonesia.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Pemerintahan, S. A. (n.d.). *Sambutan Ketua Komite Konsultatif*.

- Perwira, M. P. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007-2013*.
https://eprints.uny.ac.id/15304/1/Jurnal_Muhammad_Yogi_Perwira_13812142009.pdf
- Prasetya, G. E. (2005). *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ANDI.
- Rahmawati, I. F., Wardana, L. K., & Susilawati, D. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jurnal Akutansi Terapan Indonesia*, 1, 91–99. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Rorong, I. P. F., Rotinsulu, T. O., & Onibala, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22, 67–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.35097.22.2.2021>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sartika, N. (2019). Inovbiz Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. In *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7). www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Septiana, E. (2017). Kajian Pustaka tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 151–157.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6692>
- Setyawati, R., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akutansi Bisnis Dan Publik*, 3, 256–268.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v3i2.429>
- Sugiyanto, H., & Kusumaningrum, E. B. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27, 630–643.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.1815>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sukma, N. P. G., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7, 40–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Sularso, H. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1, 109–124. http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22

- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Tama, I. G. M. A. A. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akutansi*, 1, 94–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/persi.v1i1.p91-113>
- Tarjunajah, T., & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek. *Jurnal Riset Akutansi Dan Perpajakan*, 5, 175–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.02.16>
- Ulum, I. M. (2009). *Audit sektor publik*. Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah..
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah..
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Yusra, I., & Arnaldi. (2019). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2014-2018 untuk mengukur kinerja keuangan daerah. *Jurnal Pundi*, 4, 83–87. <https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.182>